

Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat)

Agustina Emmi Kurniastuti¹

Diterima : 11 Oktober 2013

Disetujui : 25 Oktober 2013

ABSTRACT

The environmental development in Indonesia, especially in Jakarta, is always ignored, which make the environmental quality of Jakarta decreases. The improvement of the environmental quality of Jakarta can be done with a good green space management, especially in the form of urban forest which have a high ecological and social function. We can easily see a bad appearance of the urban forest in Jakarta, including the Urban Forest of Srengseng (UFS). This study was conducted with a qualitative approach. On one hand, the management of UFS can be said as good enough. But on the other hand, this urban forest has not been managed well enough, which is evident from the response of most of the people who complained about the poor condition of the UFS. However, people show a positive support to the existence of the UFS as well as to its management. Therefore, the quality of the UFS needs to be improved by improving several aspects in the management of urban forest, namely the availability of a complete and accurate data about the urban forest and its content, the availability of an adequate technical regulation related to urban forest management, the availability of a long-term planning as a guideline for a sustainable urban forest maintenance, the enhancement of the urban forest management knowledge and skills, and the good cooperation between the urban forest manager and various related parties.

Keywords: urban forest, management

ABSTRAK

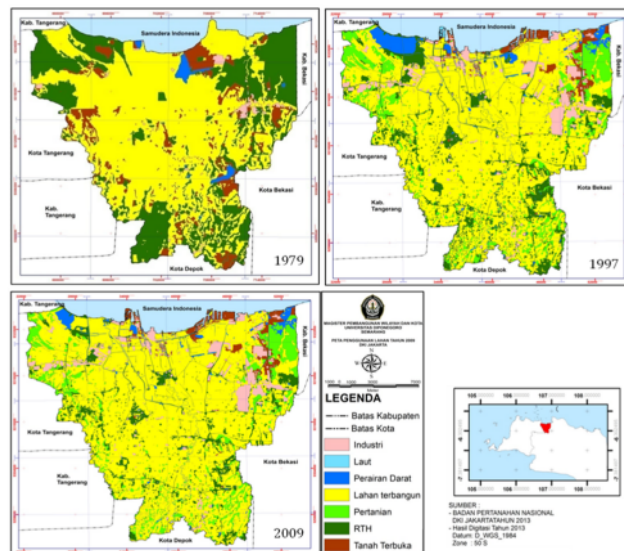
Pembangunan lingkungan hidup di Indonesia, terutama Jakarta, selalu diabaikan sehingga kualitas lingkungannya semakin menurun. Upaya perbaikan lingkungan Kota Jakarta dapat dilakukan, salah satunya dengan pengelolaan RTH yang baik, terutama dalam bentuk hutan kota yang memiliki fungsi ekologi dan sosial yang tinggi. Secara kasat mata, penampilan hutan kota di Jakarta tidak tampak menarik, tidak terkecuali Hutan Kota Srengseng (HKS). Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Di satu sisi, pengelolaan HKS dapat dikatakan baik. Namun di sisi lain, HKS ini belum dikelola dengan cukup baik, yang terlihat dari respons sebagian besar masyarakat yang mengeluhkan kondisi HKS yang kurang baik. Namun demikian, masyarakat menunjukkan dukungan yang sangat positif akan keberadaan HKS serta pengelolaannya. Oleh karenanya, kualitas HKS perlu ditingkatkan dengan memperbaiki beberapa aspek dalam pengelolaan hutan kota, yaitu ketersediaan data yang lengkap dan akurat mengenai isi hutan kota, ketersediaan peraturan teknis yang memadai terkait pengelolaan hutan kota, ketersediaan perencanaan jangka panjang sebagai pedoman untuk pemeliharaan hutan kota secara berkelanjutan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola di bidang hutan kota, serta kerjasama yang baik antara pengelola dengan berbagai pihak terkait.

Kata kunci: hutan kota, pengelolaan

¹ Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah
Kontak Penulis : agustina.emmi@gmail.com

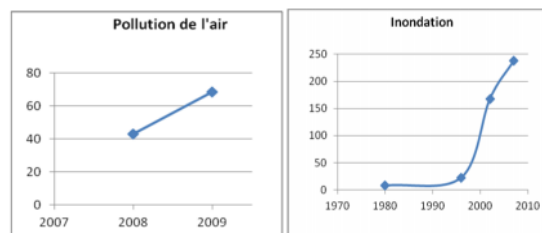
PENDAHULUAN

Indonesia memegang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional dan perencanaan wilayahnya. Pada kenyataannya, pembangunan yang dilakukan di Indonesia, cenderung mendukung pembangunan ekonomi, sementara pembangunan lingkungan, dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) selalu diabaikan, terutama di kota besar. RTH seringkali dipandang sebagai ruang yang tidak bernilai ekonomi, sehingga ia dikonversi menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan untuk meningkatkan perekonomian kota. Di sisi lain, kualitas lingkungan kota Jakarta semakin menurun, terutama peningkatan suhu udara dan polusi udara. Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota Jakarta dapat dilakukan dengan penambahan luas RTH ataupun pengelolaan RTH. Adapun RTH yang dimaksud adalah dalam bentuk hutan kota, karena hutan kota didominasi oleh pepohonan kehutanan yang tumbuh relatif rapat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota; Fakuara, 1978 dalam Dahlan, 1992:29; Irwan, 1998). Dengan demikian, hutan kota mampu memberikan manfaat yang lebih besar, baik manfaat ekologis, sosial, kultural, maupun arsitektural, dibandingkan dengan bentuk RTH lainnya. Namun, pengelolaan yang baik terhadap hutan kota yang ada, menjadi prioritas untuk dilakukan, dibandingkan dengan peningkatan luas hutan kota di Jakarta.



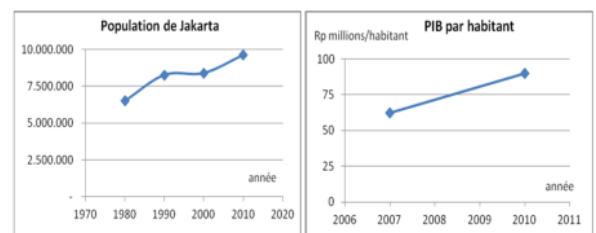
Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2013, Digitasi ulang oleh : Nugrahini Sandy Aji, 2013

GAMBAR 1
PENURUNAN LUAS RTH DI JAKARTA



Sumber: Survey Lapangan, 2013

GAMBAR 2
PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN DI JAKARTA



Sumber: Survey Lapangan, 2013

GAMBAR 3
TEKANAN RTH OLEH PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK DAN PENINGKATAN EKONOMI JAKARTA

Hal tersebut disebabkan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan di Jakarta mengingat peningkatan penduduk sangat tinggi (data Badan Pusat Statistik 1020 : 6.503.449 penduduk tahun 1980, 8.259.266 penduduk tahun 1990, 8.389.443 penduduk tahun 2000, dan terakhir 9.607.787 penduduk tahun 2010 pada lahan seluas 662,33 km²), demikian pula dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga meningkatkan tekanan terhadap penggunaan lahan untuk RTH.

Permasalahan yang terlihat di Jakarta adalah bahwa, berdasarkan pengamatan penulis dan juga pengamatan beberapa media, hutan kota di Jakarta tidak dalam kondisi yang prima. Demikian pula dengan Hutan Kota Srengseng (HKS) yang terletak di Jakarta Barat, sebagai hutan kota pertama yang ditetapkan oleh gubernur DKI Jakarta sebagai hutan kota pada tahun 1995, sebagai pionir dan contoh dalam pembangunan hutan kota di Jakarta, hutan kota ini tidak dalam kondisi yang baik/sempurna. Beberapa fasilitas yang rusak, semak dan tumbuhan tidak terawat, dan sampah yang berserakan, terlihat di beberapa bagian hutan kota ini, yang memberikan kesan bahwa hutan kota ini tidak mendapatkan cukup perawatan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi fungsi hutan kota ini, terutama fungsi sosialnya sebagai tempat berinteraksi dan berekreasi bagi masyarakat. Oleh karenanya pengelolaan HKS menjadi topik yang penting dan menarik untuk diteliti. Oleh karenanya, pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengetahui “Bagaimanakah pengelolaan HKS yang dilakukan oleh pengelola ?”. Kemudian, penulis juga tertarik untuk mengetahui “Bagaimanakah respons masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang tinggal di sekitar hutan kota ini dan pengunjung hutan kota ini) terhadap keberadaan HKS dan pengelolaannya ?”. Pertanyaan selanjutnya adalah “Bagaimanakah pengelolaan Hutan Kota Srengseng yang lebih baik, agar dapat berfungsi secara lebih optimal ?”. Adapun jawaban dari pertanyaan tersebut, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam peningkatan upaya pengelolaan Hutan Kota Srengseng, sehingga hutan kota ini dapat lestari dan dapat memberikan manfaat lebih besar lagi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai pengelolaan hutan kota ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait topik penelitian dari berbagai sumber, kemudian menganalisisnya untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi (Creswell, 2010). Untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola HKS, penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan pengelola dan beberapa pihak terkait, pengamatan lapangan, serta penelaahan dokumen dari berbagai sumber. Untuk mengetahui aktivitas masyarakat di HKS, respons dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan HKS, pendapat masyarakat akan pengelolaan HKS, dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan HKS, penelitian dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada masyarakat, dalam hal ini penduduk sekitar HKS dan pengunjung HKS. Adapun, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling*, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden dalam penelitian ini (Nazir, 2003). Untuk memperkuat analisis dari hasil kuisioner tersebut, metode analisis *cross-tabulation*, dengan menggunakan alat SPSS 17, pun dilakukan, untuk melihat keterkaitan antara tempat tinggal, pendidikan, dan kondisi ekonomi pengunjung Hutan Kota Srengseng dengan frekuensi kunjungan ke hutan kota dan pilihan tempat wisata. Pada akhirnya, hanya terdapat 136 orang pengunjung HKS dan 107 orang penduduk sekitar HKS, yang bersedia mengisi kuisioner tersebut. Sementara untuk mengetahui elemen-elemen pengelolaan hutan kota yang tidak berjalan dengan baik pada pengelolaan Hutan Kota

Srengseng serta perbaikan yang diperlukan, penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner yang disertai dengan wawancara mendalam kepada orang yang dianggap cukup mengerti hutan kota, terutama HKS. Adapun, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena tidak banyak orang yang mengerti dan menguasai bidang hutan kota, terutama pengelolaan HKS. Pada akhirnya hanya terdapat 8 orang responden (2 orang pengelola HKS dan 6 orang akademisi dan praktisi), untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terakhir.

GAMBARAN UMUM

Penelitian ini mengambil contoh kasus Hutan Kota Srengseng (HKS). Secara geografi, ia terletak pada 6°13'12" Lintang Selatan dan 106°49" Bujur Timur, dengan ketinggian 7 mdpl, dan dengan kemiringan yang cukup bervariasi dari datar 0-3% (7,40 Ha), miring 8-25% (2,10 Ha), hingga curam >25% (1,20 Ha). Secara lebih spesifik, hutan kota Srengseng terletak di Jalan Haji Kelik, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat. Hutan kota seluas 15 Ha ini, awalnya adalah tempat pembuangan sampah dengan Sistem Gali Uruk. Tahun 1994, tempat pembuangan sampah tersebut dikonversi menjadi RTH. Sejak tahun 1994, lokasi tersebut dijadikan daerah resapan air dan perlindungan plasma nutfah, serta dimanfaatkan pula sebagai tempat rekreasi dan tempat aktivitas masyarakat, yang ditetapkan kemudian melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta n°202 tahun 1995. Hutan kota ini juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana (cukup lengkap jika dibandingkan dengan hutan kota lainnya di Jakarta), seperti kantor administrasi, pos jaga, pintu masuk, danau buatan seluas 6.000 m², jalur jogging, taman bermain beserta beberapa jenis permainan untuk anak-anak, tempat parkir, menara pandang yang disatukan dengan fasilitas untuk panjat tebing, panggung terbuka sebagai tempat aktivitas masyarakat, toilet, tempat ibadah (musholla), tempat sampah, dan pintu air.

TEORI KEBERLANGSUNGAN MENETAP PENDUDUK PADA KAWASAN YANG TERGENTRIKASI

Hutan kota, di Indonesia, didefinisikan sebagai sekumpulan pohon (yang didominasi oleh pohon kehutanan), yang tumbuh relatif rapat, bersama dengan tanaman lainnya, di dalam suatu area tertentu di kota, yang mampu memberikan berbagai manfaat, baik bagi lingkungan perkotaan maupun bagi masyarakat kota. Ia juga harus ditetapkan secara sah dan legal oleh institusi yang berwenang ((Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota; Fakuara, 1978 dalam Dahlan, 1992:29; Irwan, 1998). Hutan kota pada dasarnya memiliki fungsi ekologi, sosial, psikologi, ekonomi, arsitektural dan estetik. Secara ekologi, hutan kota mampu memperbaiki iklim, mencegah erosi tanah dan melestarikan air tanah, mengurangi kebisingan, menyerap polusi udara, mengurangi banjir, menyerap CO₂ dan menghasilkan O₂, mencegah hujan asam, mengurangi emisi karbon, menetralkan air kotor, dan menjadi habitat flora dan fauna (Frey dan Yaneske, 1978; Dahlan, 2004; Dahlan, 1992; Dwyer et al., 1992; Irwan, 1998; Miller, 1998; Schneider, 1989; Nowak 1993 & 1994a, Nowak, et al., 2002b; Moll & Kollin 1996; Jo and Mc Pherson, 2001, dalam Carreiro, et al., 2008; Muhammad dan Nurbianto, 2006; Joga dan Antar, 2007; Robinette, 1972, Federer, 1970, Embleton, 1963, Grey dan Deneke, 1978, dalam Grey dan Deneke, 1978). Secara sosial dan psikologi, hutan kota berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat bersantai, tempat belajar dan penelitian, dan memberikan efek positif bagi kesehatan fisik, mental dan psikologis masyarakat (Dahlan, 1992; Ulrich, 1981, Kaplan, 1983, Hartig, et al., 1991, Conway, 2000, Godbey, et al., 1992, Schroeder, 1991, Coley, et al., 1997, dalam Chiesura, 2004; Chiesura, 2004; Irwan, 1998; Miller,

1997; Drivers dan Rosenthal, 1978, dalam Miller, 1997; Carreiro, et al., 2008). Secara ekonomi, hutan kota dapat mengurangi biaya penanganan polusi dan pendinginan ruangan, meningkatkan nilai lahan di sekitarnya, dan menambah lowongan pekerjaan bagi masyarakat (Dahlan, 1992; Tagtow, 1990, Luttik, 2000, dalam Chiesura, 2004; Miller, 1997; Fezer, 1995, dalam Carreiro, et al., 2008). Sementara secara arsitektural dan estetika, keberadaan hutan kota dalam meningkatkan keindahan kota dan menjadikan kota lebih nyaman untuk dihuni (Dahlan, 1992; Irwan, 1998; Careirro, et al., 2008).



Sumber : http://www.censin.com/peta-jawa-map/en_2003 dan Periplus Travel Maps

GAMBAR 4
LOKASI HUTAN KOTA SRENGSENG

Sementara itu, pengelolaan hutan kota didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan mengkombinasikan antara seni, pengetahuan, dan teknologi, dalam mengelola pepohonan dan sumber daya kehutanan di suatu kota agar dapat berfungsi dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Helm, 1998, dalam Knuth, 2005; Grey, 1996). Secara umum, pengelolaan hutan kota juga dapat dikelompokkan ke dalam 4 kegiatan besar, seperti layaknya pengelolaan (manajemen) secara umum, yaitu perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pengaktualisasian (Actualisation), dan pengawasan (Controle), atau biasa dikenal dengan singkatan POAC (disarikan dari berbagai sumber: Dahlan. 1992; Dahlan. 2004; Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1991; Carter. 1995; Clark, et al. 1997; Grey. 1996; Rines, et al. 2011; Bista. 2009; Miller. 1997; Grey dan Deneke. 1978; Carreiro, et al. 2008). Adapun, perencanaan dalam pengelolaan hutan kota meliputi kegiatan perencanaan itu sendiri, pendanaan, pengenalan lingkungan hutan kota, pengetahuan akan kebutuhan dari hutan kota, penanaman, pengimplementasian, dan pendokumentasian yang efektif. Pengorganisasian meliputi dukungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Lebih lanjut, aspek kelembagaan tersebut lebih kompleks karena ia terdiri dari kebijakan/peraturan, aktor-aktor yang terlibat,

struktur dan bentuk organisasi, dan proses (Connor dan Dovers, 2004) dalam pengelolaan hutan kota. Sementara, pengaktualisasian meliputi penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Sedangkan pengawasan dalam pengelolaan hutan kota meliputi pengawasan dan pemeliharaan hutan kota, dan pengelolaan sampah. Akan tetapi, karena berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan waktu, maka pada penelitian ini penulis hanya dapat melihat beberapa aspek yang ada dalam pengelolaan hutan kota.

ANALISIS

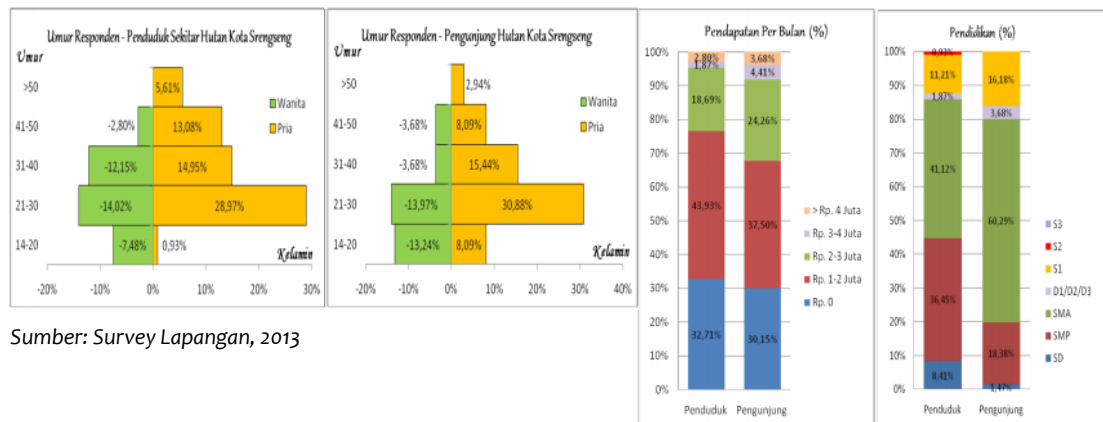
Pemerintah DKI Jakarta, melalui Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang disertai kewenangan untuk mengelola hutan kota di Jakarta, telah berupaya mengelola hutan kota dengan baik, termasuk hutan kota Srengseng. Beberapa pegawai dengan berbagai disiplin ilmu, ditempatkan di dinas tersebut untuk mengelola hutan kota. Lebih spesifik, hutan kota Srengseng dikelola secara teknis dan sehari-hari oleh seorang penanggung jawab yang dibantu oleh seorang polisi hutan. Seluruh aktivitas pengelolaan hutan kota, dicantumkan dalam perencanaan tahunan. Pengelolaan hutan kota sangat mengandalkan dana dari pemerintah. Selain itu, hutan kota Srengseng juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Di satu sisi, pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil survei lapangan yang menunjukkan cukup besarnya penggunaan hutan kota Srengseng oleh masyarakat. Pengunjung hutan kota ini pun cukup tinggi, yang mencapai sekitar 1.400 orang/bulan (tahun 2012). Bahkan seluruh responden merasa bahwa keberadaan hutan kota tersebut memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Keberadaan hutan kota Srengseng ini, terutama sangat dimanfaatkan oleh mereka yang berasal dari golongan muda yang berumur kurang dari 40 tahun (khususnya berumur 21-30 tahun), dari golongan ekonomi menengah ke bawah (dengan pendapatan kurang dari Rp 3 juta/bulan), dari golongan pendidikan yang tidak terlalu tinggi, dan mereka yang tinggal dekat dengan hutan kota. Pengunjung tersebut (lebih dari 60%) sering mengunjungi hutan kota Srengseng untuk berbagai tujuan, terutama untuk berekreasi, menghabiskan waktu luang, berolah raga, menyalurkan hobi, dengan jangka waktu yang cukup lama, sekitar 1-2 jam. Bahkan hutan kota ini juga digunakan oleh komunitas tertentu untuk mengadakan acara.

Mayoritas responden ($\pm 80\%$) adalah mereka yang memiliki usia kurang dari 40 tahun. Lebih jelasnya, pengguna hutan kota Srengseng didominasi oleh masyarakat dengan umur 21-30 tahun yaitu sekitar 43,92% (42,99% penduduk sekitar dan 44,85% pengunjung), diikuti oleh masyarakat dengan umur 31-40 tahun yaitu sekitar 23,11% (27,10% penduduk sekitar dan 19,12% pengunjung), dan juga masyarakat dengan umur 14-20 tahun yaitu sekitar 14,86% (8,41% penduduk sekitar dan 21,32% pengunjung). Fenomena yang sama juga dijumpai pada penelitian di luar negeri oleh Baillon (1975) dan Roovers (2002) dalam Roovers, *et al.*, 2002, dimana masyarakat yang mengunjungi hutan kota umumnya adalah kelompok usia muda, dengan umur 31-45 tahun, yang umumnya telah berkeluarga dan aktif bekerja yang diikuti dengan karir yang bagus. Sedikit perbedaan dengan hasil penelitian di Jakarta, mereka yang mengunjungi HKS memiliki usia yang lebih muda. Hal itu kemungkinan besar terkait dengan usia bekerja di Indonesia yaitu pada usia 15-64 ans, bahkan, banyak pula yang memutuskan untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA (18-19 tahun), atau SMP (15-16 tahun), dan kemudian memutuskan untuk menikah. Oleh karenanya, pada usia yang relatif masih muda, terutama di usia 20-an atau 30-an tahun, sebagian besar masyarakat menghadapi perubahan

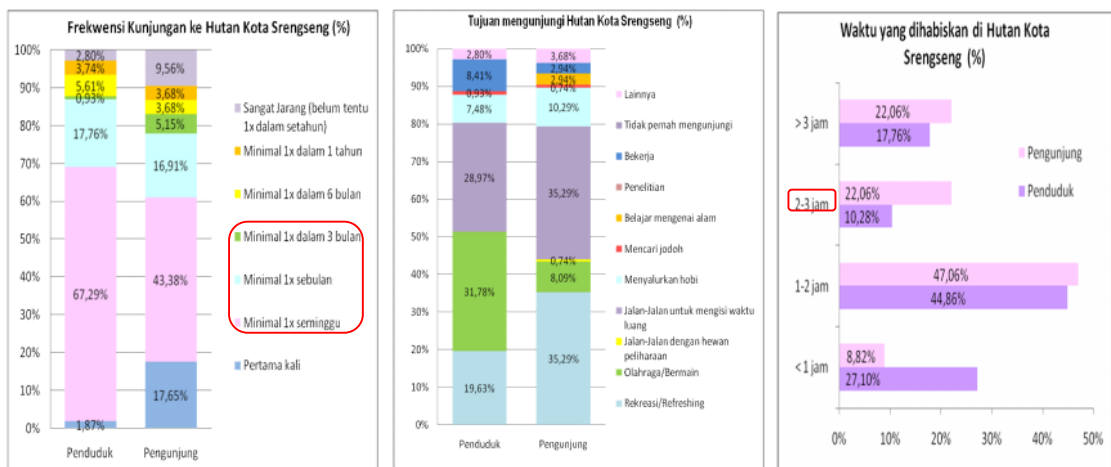
besar dalam hidupnya, terutama dalam hal pekerjaan/karir dan pernikahan, sehingga tekanan hidup cukup tinggi dan untuk melepaskan beban tersebut mereka membutuhkan tempat rekreasi.

Kelompok selanjutnya yang sangat memanfaatkan hutan kota Srengseng adalah kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, dengan pendapatan kurang dari Rp. 3 juta/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan kota menjadi pilihan utama tempat rekreasi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, yang diperkuat pula oleh hasil statistik atas jawaban dari pengunjung hutan kota Srengseng, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan pengunjung dengan frekwensi kunjungan ke hutan kota (nilai *pearson chi square* = 0,027) Hal tersebut terkait pula dengan tidak cukup tingginya pendidikan mereka sehingga berimplikasi terhadap pekerjaan yang mereka miliki pula. Oleh karena itu mereka membutuhkan tempat rekreasi yang murah, salah satunya adalah hutan kota.



Sumber: Survey Lapangan, 2013

GAMBAR 5
KELOMPOK MAYORITAS PENGGUNA HKS



Sumber: Survey Lapangan, 2013

Sumber: Survey Lapangan, 2013

Sumber: Survey Lapangan, 2013

GAMBAR 6
FREKUENSI KUNJUNGAN YANG TINGGI KE HKS

GAMBAR 7
BERBAGAI TUJUAN MASYARAKAT MENGUNJUNGI

GAMBAR 8
MASYARAKAT MENGHABISKAN WAKTU CUKUP LAMA DI HKS

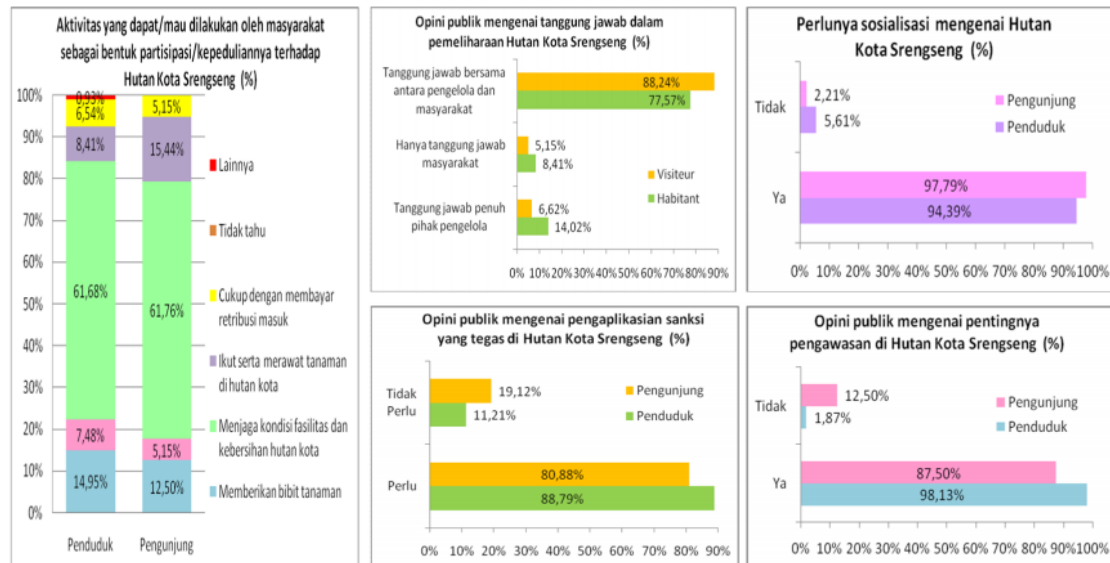
Lindhagen (1996) dan Roovers (2002) dalam Roovers, *et al.*, 2002, mengatakan bahwa faktor kedekatan tempat tinggal masyarakat dengan hutan kota mempengaruhi frekwensi kunjungan ke hutan kota, atau dengan kata lain semakin pendek jarak menuju hutan kota, maka frekwensi kunjungan ke hutan kota semakin tinggi. Jika mengamati jawaban dari para responden, dimana 80,98% penduduk sekitar HKS dan 63,21% pengunjung yang sering mengunjungi HKS, tinggal tidak jauh dari hutan kota ini, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis Lindhagen dan Roovers juga berlaku pada kasus HKS. Pemikiran tersebut diperkuat pula oleh hasil perhitungan statistik atas jawaban pengunjung hutan kota Srengseng, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara frekwensi kunjungan dengan lokasi tempat tinggal pengunjung (nilai *pearson chi square* = 0,003 untuk kecamatan, dan 0,001 untuk kelurahan), dan juga keterkaitan antara kedekatan tempat tinggal pengunjung dengan pilihan tempat wisata/hiburan (nilai *pearson chi square* = 0,28 untuk kelurahan, dan 0,25 untuk kotamadya), dimana cukup banyak responden yang memilih hutan kota sebagai tujuan utama tempat rekreasi.

Secara garis besar, tujuan utama masyarakat mengunjungi hutan kota Srengseng adalah pertama untuk berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu luang (32,13%) dan berekreasi (27,46%), yang mengutamakan aktivitas berjalan kaki. Tujuan kedua adalah untuk berolahraga (19,93%), yang pada umumnya dilakukan dengan *jogging* atau bersepeda. Tujuan utama lainnya adalah untuk menyalurkan hobi (8,88%). Seperti halnya aktivitas berjalan kaki merupakan aktivitas utama pengunjung hutan kota di beberapa negara (di Jerman oleh Roznay, 1972; di Flanders oleh Gillis dan Lust, 1976 dan Vanderlinden dan Lust, 1998; di Swedia oleh Lindhagen, 1996; di Switzerland oleh Gasser, 1997; di Irlandia oleh Guyer dan Pollard, 1997, dalam P. Roovers, *et al.* 2002), yang diikuti dengan aktivitas berolahraga dalam bentuk *jogging* atau bersepeda, hal tersebut juga menjadi aktivitas dan motivasi utama yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta saat mengunjungi hutan kota Srengseng. Namun sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, tidak hanya aktivitas berjalan kaki dan berolahraga saja, tetapi aktivitas menyalurkan hobi, terutama memancing, juga menjadi motivasi kuat sebagian masyarakat Jakarta untuk mengunjungi hutan kota Srengseng. Hal tersebut seiring dengan meningkatkan aktivitas memancing sebagai salah satu aktivitas untuk melepas lelah (Tulisan Ediyus Merli dalam koran Suara Pembaruan Daily yang disadur di <http://groups.yahoo.com/group/IPB-Fisheries/message/3087?var=1>).

Di sisi lain, pengelolaan Hutan Kota Srengseng belum dilakukan dengan cukup baik oleh pengelola. Hal tersebut terlihat dari respons sebagian besar masyarakat, yaitu 76,99% responden (73,83% penduduk sekitar dan 80,15% pengunjung), yang mengatakan bahwa kondisi HKS kurang baik. Mereka mengeluhkan akan kurang terawatnya banyak sarana dan prasarana yang ada dan juga tanaman yang ada, kurang lengkapnya sarana dan prasarana, serta kurang terjaganya kebersihan hutan kota di beberapa bagian hutan kota. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat (sekitar 52,57% responden) lebih memilih tempat hiburan lain, selain hutan kota, sebagai pilihan utama untuk rekreasi. Hal tersebut disebabkan diantaranya karena pengelolaan yang dilakukan belum didukung oleh ketiadaan peraturan teknis terkait pengelolaan hutan kota dan sanksi tegas terhadap perusakan hutan kota, serta peraturan dasar dan teknis mengenai standar minimal hutan kota yang baik dan standar minimal pengelolaan hutan kota. Padahal, salah satu karakteristik kota yang memiliki komitmen tinggi terhadap hutan kota adalah memiliki berbagai peraturan terkait pengelolaan hutan kota, yang mencakup peraturan dasar, teknis, dan administratif (Carreiro, *et al.*, 2008; Grey, 1996 dan Miller, 1997). Bahkan perencanaan yang baik sebagai merupakan dasar kegiatan pengelolaan dan dasar pengajuan anggaran (Grey, 1996) pun tidak terlihat. Perencanaan hanya dilakukan secara tahunan, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan

berkelanjutan, tetapi hanya didasarkan pada kebutuhan rutin dan kebutuhan mendesak. Padahal, perencanaan yang baik harus dilakukan secara jangka panjang dan juga jangka pendek (Grey, 1996 dan Miller, 1997). Lemahnya perencanaan tersebut, disebabkan pula oleh ketiadaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai hutan kota, padahal informasi tersebut merupakan dasar dari perencanaan (Grey, 1996 dan Carter, 1995). Selain itu, pendanaan pun kurang memadai, karena pengelola sangat bergantung pada APBD, dimana anggaran pemerintah cenderung mengutamakan pembiayaan penanganan masalah sosial di perkotaan dan pembiayaan penyediaan kebutuhan dan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, kerjasama yang baik antara pengelola dengan berbagai pihak terkait pun sangat lemah, yang terlihat dari minimnya koordinasi dengan instansi lain yang menangani beberapa sarana dan prasarana di HKS, ketiadaan kerjasama dengan pihak swasta maupun organisasi non pemerintah yang memiliki dana untuk membantu pemeliharaan hutan kota, serta belum terjalin baik pula kerjasama dengan masyarakat untuk turut melestarikan hutan kota. Hal tersebut didukung pula oleh lemahnya pengetahuan dan keterampilan pengelola yang memadai di bidang hutan kota, baik kemampuan teknis, sosial dan konseptual. Padahal, untuk mencapai pengelolaan yang efektif, maka dibutuhkan 3 kemampuan dasar, yaitu kemampuan teknis, sosial, dan konseptual (Miller, 1997). Lemahnya kemampuan konseptual terlihat dari perencanaan yang belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta terlihat dari ketiadaan peraturan mengenai pengelolaan hutan kota di Jakarta, baik secara umum maupun teknis. Lemahnya kemampuan sosial, terlihat dalam hal komunikasi dan pengajaran terhadap masyarakat yang masih belum memadai, serta belum berjalan dengan baiknya kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, dari segi teknis, kurangnya ketersediaan karyawan yang memiliki kemampuan yang memadai di bidang kehutanan, terutama hutan kota, mempengaruhi lemahnya perencanaan dan peraturan mengenai hutan kota di Jakarta, dan menyebabkan setiap kegiatan pemeliharaan hutan kota harus seringkali harus menunggu instruksi dari kepala bidang kehutanan ataupun kepala seksi pengelolaan hutan (selain dari ketiadaan delegasi tugas yang jelas terhadap penanggung jawab hutan kota melalui peraturan teknis). Akan tetapi, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola pun tidak terlihat dengan alasan ketiadaan dana, dan ketiadaan kewenangan penyelenggaraan pelatihan. Kondisi tersebut mengakibatkan sulitnya melaksanakan kegiatan pemeliharaan hutan kota yang baik. Kondisi HKS saat ini tidak hanya disebabkan oleh kelemahan pengelola, tetapi masyarakat, yaitu 30,76% responden (29,91% penduduk sekitar dan 31,62% pengunjung), juga menyadari bahwa rendahnya kepedulian masyarakat akan lingkungan, turut memberikan kontribusi terhadap kondisi hutan kota.

Namun demikian, masyarakat menunjukkan dukungan yang sangat positif terkait keberadaan HKS. Hal tersebut terlihat dari respons masyarakat yang menyatakan bahwa mereka (100% responden) tidak terganggu dengan keberadaan hutan kota ini. HKS pun menjadi pilihan utama dari cukup banyak orang, yaitu sekitar 47,43% responden (55,15% penduduk sekitar dan 39,71% pengunjung) sebagai tempat rekreasi. Kemudian, hampir seluruh responden (96,26% penduduk sekitar dan 97,06% pengunjung) menginginkan multiplikasi hutan kota di Jakarta dengan konsep yang kurang lebih sama dengan HKS, untuk alasan ekologi, sosial, dan estetika. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan dukungan yang sangat positif terhadap pengelolaan Hutan Kota Srengseng dengan menginginkan kelestarian dan perbaikan terhadap kualitas hutan kota ini, dengan mengharapkan peningkatan sosialisasi mengenai hutan kota kepada masyarakat luas, dengan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Hutan Kota Srengseng, dengan bersedia untuk diawasi oleh pengelola pada saat melakukan aktivitas di hutan kota, serta dengan bersedia untuk dikenakan sanksi jika mereka merusak atau mengotori hutan kota. Dukungan masyarakat yang cukup positif tersebut terjadi karena masyarakat telah merasakan manfaat yang cukup besar dari Hutan Kota Srengseng.



Sumber: Survey Lapangan, 2013

GAMBAR 11
DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN DAN PENGELOLAAN HKS

Oleh karenanya, perbaikan kualitas Hutan Kota Srengseng, harus dilakukan tidak hanya sebatas pada perbaikan pemeliharaan fisik hutan kota (fasilitas, kebersihan dan tanaman), tetapi perlu dilakukan perbaikan berarti terhadap beberapa aspek dalam pengelolaan hutan kota. Perbaikan pertama yang perlu dilakukan adalah pendokumentasian yang lengkap dan akurat terhadap hutan kota dan isinya, sebagai dasar untuk melakukan perencanaan yang baik, yang didukung pula oleh dasar hukum yang cukup kuat dalam bentuk peraturan teknis mengenai pengelolaan hutan kota dan peraturan mengenai sanksi terhadap perusakan hutan kota. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang harus dibuat oleh pengelola, yang kemudian dijabarkan secara lebih detil dalam bentuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, agar pemeliharaan Hutan Kota Srengseng dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal tersebut harus didukung pula oleh perbaikan pengetahuan dan keterampilan pengelola di bidang hutan kota, yang dapat dilakukan baik dengan pelatihan, sertifikasi, maupun studi banding. Selain itu, kerjasama antara pengelola hutan kota dengan berbagai pihak terkait juga perlu ditingkatkan. Kerjasama dengan masyarakat ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi yang cukup baik mengenai hutan kota kepada masyarakat untuk mengubah paradigma masyarakat akan hutan kota, dan dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengolah sampah organik menjadi kompos. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dengan mengajak sektor swasta berpartisipasi dalam pemeliharaan hutan kota melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimilikinya. Kerjasama dengan dinas terkait lainnya, dilakukan dengan melakukan koordinasi yang baik dalam pemeliharaan ataupun penambahan fasilitas, serta dalam pemeliharaan kebersihan hutan kota. Selain itu, kerjasama juga harus ditingkatkan dengan pemerintah setempat untuk pelestarian dan perlindungan hutan kota, serta dengan akademisi untuk melakukan penelitian terkait hutan kota dan untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi pengelola hutan kota.

KESIMPULAN

Pihak pengelola HKS telah berupaya mengelola hutan kota dengan baik. Beberapa elemen dalam pengelolaan hutan kota telah dapat dipenuhi dengan baik, seperti sumber daya manusia dengan multidisiplin ilmu, perencanaan tahunan, ketersediaan dana pemerintah, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Berkat hal tersebut, HKS telah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, upaya tersebut belum cukup baik sehingga sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa kondisi HKS ini masih jauh dari harapan. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan akan kurangnya perhatian pihak pengelola akan perawatan kebersihan hutan kota, dan perawatan sarana dan prasarana, serta tanaman yang ada di HKS. Namun demikian, dukungan masyarakat sangat positif terkait keberadaan Hutan Kota Srengseng dan pengelolaannya, karena mereka telah merasakan manfaat yang besar dari HKS. Adapun, kondisi HKS yang masih jauh dari harapan, ditilik dari aspek pengelolaan hutan kota, disebabkan karena masih banyak elemen pengelolaan hutan kota yang belum dapat dipenuhi oleh pengelola, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, perencanaan yang berkelanjutan, informasi yang lengkap dan akurat, pendanaan yang memadai, dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait (termasuk dengan masyarakat). Para ahli di bidang hutan kota (yang menjadi narasumber) pun setuju bahwa elemen-elemen tersebut menjadi elemen penting dan prioritas untuk diperbaiki oleh pengelola HKS.

DAFTAR PUSTAKA

- Bista, R. 2009. *Institutional Involvement and People's Perception Toward Urban Forestry (A Case Study Of Lalitpur Sub-Metropolitan City)*. Skripsi Universitas Tribhuvan-Nepal.
- Carter, E.J. 1995. *The Potential of Urban Forestry in Developing Countries : A Concept Paper*. Roma. FAO. dalam situs : <http://www.fao.org/docrep/005/t1680e/t1680e00.HTM>.
- Carreiro, M. M., et al. 2008. *Ecology, Planning, and Management of Urban Forests : International Perspectives*. New York. Springer.
- Chiesura, A. 2004. *The Role of Urban Parks for The Sustainable City*. Landscape and Urban Planning Volume 68, p. 129-138.
- Clark, J.R., et al. 1997. *A Model of Urban Forest Sustainability*. Journal of Arboriculture 23(1), p. 17-30.
- Connor, R., dan S. Dovers. 2004. *Institutional Change for Sustainable Development*. Massachusetts. Edward Elgar Publishing Inc.
- Creswell, J.W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Dahlan, E. N. 1992. *Hutan Kota : Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*. Jakarta. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.
- _____. 2004. *Membangun Kota Kebun (Garden City) Bernuansa Hutan Kota*. Bogor. ISBN.
- Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. 1991. *Pola Umum Pembangunan Hutan Kota*. Jakarta. Kementerian Kehutanan.
- Dwyer, J.F., et al. 1992. *Assessing the Benefit And Cost of Urban Forest*. USA. Journal of Arboriculture (18) 5, p. 227-234.
- Frey, H., dan P. Yaneske. 2007. *Visions of Sustainability : Cities and Region*. New York. Taylor & Francis Inc.
- Grey, G.W. dan F.J. Deneke. 1978. *Urban Forestry*. New York. John Wiley and Sons Inc.
- Grey, G.W. 1996. *The Urban Forestry : Comprehensive Management*. New York. John Wiley and Sons, Inc.

- Irwan, Z.D. 1998. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Jakarta. Pustaka Cidesindo.
- Joga, N. dan Y. Antar. 2007. Komedi Lenong : Satire Ruang Terbuka Hijau. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Knuth, L. 2005. *Legal and Institutional Aspects of Urban and Peri-Urban Forestry and Greening*. Rome. FAO.
- Miller, R.W. 1997. *Urban Forestry : Planning and Managing Urban Greenspaces*. Illinois. Waveland Press Inc.
- Muhammad, A. dan B. Nurbianto. 2006. Jakarta Kota Polusi : Menggugat Hak Atas Udara Bersih. Jakarta. Pustaka LP3ES.
- M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang *Hutan Kota*.
- Rines, D., et al. 2011. *Measuring Urban Forestry Performance and Demographic Association in Massachusetts, USA*. *Journal of Urban Forest and Urban Greening*, Volume 10, Issue 2, p. 113-118.
- Roovers, P., et al. 2002. *Visitor Profile, Perceptions and Expectations in Forest from A Gradient of Increasing Urbanisation in Central Belgium*. *Journal of Landscape and Urban Planning* 59, p.129-145.